

**Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola
Keuangan Daerah Terhadap kinerja Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)**

By:

Yuanna Try Selvi

Dra. Vince Ratnawati, M.Si., Ak., BKP., CA

Supriono, S.E., M.Ak., Ak., CA

Faculty of economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: yuannatryselvi@ymail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of participation in budgeting and financial management managerial roles with the object of the entire study area SKPDs Rokan Hulu district, consist of 25 SKPD.

The research sample are 100 respondents consisting of 13 heads of department, 30 head of sector, 27 head subsections, and 1 hospital director in Rokan Hulu district. Data collected by distributing questionnaires. From 100 questionnaires sent, there were 74 respondents who returns the questionnaires and only 70 questionnaires that can be processed and analyzed. sampling techniques using simple random sampling. The method of data collection is by distributing questionnaires. Analysis using multiple regression.

The results of this study we concluded that participation in budgeting and financial management managerial role area significantly positive effect on the performance of local government. In this study the magnitude of the effect that the R² of 0.230 or 23% indicated that participation in budgeting and financial management managerial roles affect the performance of the local government area by 23%. The results of this study support previous studies.

**Keywords: Participation in Budgeting, Managerial Role of Financial Management
The Local Government Performance.**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan adanya pengaruh globalisasi, telah mendorong masyarakat untuk melakukan tuntutan gencar akan adanya perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik (*Good Governance*). Tuntutan masyarakat ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2009). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan

dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan anggaran publik umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. Pada organisasi pemerintahan di Indonesia sejalan dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lahirnya empat paket perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2001 tentang perbendaharaan negara, UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya perencanaan serta anggaran pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya.

Namun demikian dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, asas umum tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu: keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelola keuangan adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal (PP No. 39 Tahun 2007). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005).

Pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informai yang memadai. Menurut Mardiasmo (2009), bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan

manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab.

Pada dasarnya kinerja adalah hasil suatu kegiatan. Istilah kinerja ini juga sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari berbagai aktivitas yang dilakukan dari mendayagunakan sumber daya yang ada (Catur, 2008). Sedangkan menurut Indra (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Kinerja pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan Pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkatan pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil.

Berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil akhir dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pusat dan provinsi dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2011 hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun 2012

bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun 2011 baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi enam provinsi. Meskipun demikian masih banyak instansi pusat dan pemerintah provinsi yang mendapat nilai kurang bagus, yang diakibatkan adanya ketidaksielarasan antara Renstra dengan RPJMN, ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kerja, ketidaksielarasan antara perencanaan dengan anggaran.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2012. Adapun akun yang dijadikan pengecualian dalam opini BPK RI adalah: *Pertama*, Terdapat saldo investasi non permanen – dana bergulir per 31 Desember 2012 yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai. *Kedua*, Terdapat nilai asset tetap per 31 Desember 2012 yang belum disajikan dengan konsep harga perolehan sesuai dengan SAP dan terdapat selisih mutasi TA 2012 yang tidak dapat dijelaskan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Apakah partisipasi dalam anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Apakah peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Membuktikan adanya pengaruh partisipasi dalam anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Membuktikan adanya pengaruh peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah eselon II, III, dan IV yang ada di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan hulu yang terdiri dari 25 SKPD.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu (Iskandar, 2008:74).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan partisipasi dalam anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara

mengirimkan kuesioner ke responden secara langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. (Suharsimi, 2006:151). Kuesioner akan dikirimkan langsung oleh peneliti kepada masing-masing responden yang terpilih yang berjumlah 100 responden dari 25 SKPD.

2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

2.4.1 Partisipasi dalam Penganggaran (X1)

Partisipasi dalam penganggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu dalam proses penyusunan anggaran. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala 7 poin untuk menunjukkan sejauh mana partisipasi dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Indikator untuk mengukur variabel partisipasi dalam penganggaran:

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran
2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran.
3. Kebutuhan memberikan pendapat.

4. Kerelaan dalam memberikan pendapat.
5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir.
6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usul saat anggaran disusun.

2.4.2 Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah (X2)

Peran manajerial pengelola keuangan adalah suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala 7 poin untuk menunjukkan sejauh mana peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Indikator untuk mengukur peran manajerial pengelola keuangan daerah:

1. Peran interpersonal.
2. Peran informasi.
3. Peran pengambilan keputusan.

2.4.3 Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja pemerintah daerah adalah prestasi kerja yang dicapai pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala *Likert* yang menggunakan instrumen dengan skala 7 poin. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan indikator:

1. Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program.
2. Ketepatan dan kesesuaian hasil.

3. Tingkat pencapaian program.
4. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat.
5. Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran.
6. Pencapaian efisiensi operasional.
7. Moral perilaku pegawai.

2.5 Metode Analisis Data

2.5.1 Metode Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyanto (2004) analisis linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap dependen.

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \beta^n X^n + \dots + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 =Partisipasi Dalam Penganggaran
 X_2 =Peran Manajerial Pengelola Keuangan
e = Error

2.5.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan

gambaran mengenai demografi responden. Gambaran tersebut meliputi ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, modus, kisaran standar deviasi diungkapkan untuk memperjelas deskripsi responden

2.6 Uji Kualitas Data

2.6.1 Uji Validitas

Validitas penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang diukur. Ketentuan validitas data dapat menggunakan kolerasi pearson, masing-masing jawaban pertanyaan dan total jawaban pada setiap variabel penelitiannya saling dikolerasikan. Hasil kolerasi tersebut dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen tersebut adalah valid dan sebaliknya jika r hitung negatif dan r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrumen tersebut valid (Pratisto, 2004).

2.6.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan instrumen yang sudah dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dipercaya pula.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *cronbach alpha* yaitu untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang

digunakan. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* apabila lebih dari 0,5 (Nunnally, 1967 dalam Darlis, 2005).

2.7 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan grafik histogram atau grafik normal P-Plot dimana prinsip dari normalitas ditunjukkan dengan tingkat penyebaran data pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikat arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.8 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan uji asumsi klasik yang meliputi pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

2.8.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan

standar penaksiran semakin besar. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan mengamati:

- a. Besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*, model dikatakan bebas multikolinearitas jika VIF disekitar angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* yang mendekati 1.
- b. Besaran korelasi antar variabel bebas, jika korelasi antar variabel bebas lemah (dibawah 0,5) maka dikatakan bebas multikolinearitas.

2.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dikatakan mengandung heteroskedastisitas bila varian variabel dalam model tidak sama (konstan) akibatnya penaksir besar meskipun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bias dan bertambahnya sampel yang akan digunakan akan mendekati nilai yang sebenarnya. Hal ini karena variannya tidak minimum.

Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka digunakan *scatterplot*. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika titik-titiknya menyebar secara tidak teratur (pola tidak jelas) diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.8.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu.

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.

Umumnya untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan:

1. Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi
3. Jika DW diatas +2, berarti autokorelasi negative

2.9 Uji Hipotesis

2.9.1 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan presentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. presentase menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

2.9.2 Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dikatakan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2.9.3 Uji T (Parsial)

Setelah diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bersama-sama selanjutnya perlu diketahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan uji t. Pengujian tersebut dilakukan satu arah dengan tingkat signifikan 5% dengan *degree of freedom* (dF)=n-k.

Uji t ini membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu apabila t hitung > t tabel berarti bahwa variabel bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel IV.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	26	26%
Kuesioner yang kembali	74	74%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	4	4%
Kuesioner yang dapat diolah	70	70%

Sumber : Data Olahan Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

3.1.1 Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk survey. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden tanggal 5 Mei 2014 dan diberi waktu pengisian 2 minggu sejak kuesioner diberikan. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 buah, dan yang kembali sebanyak 74 buah (74%), sedangkan yang tidak kembali sebanyak 26 buah (26%). Setelah dilakukan verifikasi dan persiapan pengelolaan data sebanyak 4 buah (4%) tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 buah (70%). Rangkumannya terdapat pada tabel IV.1.

3.1.2 Demografi Responden

Dari 70 kuesioner yang diolah, diketahui bahwa 70% atau sebanyak 49 orang yang berjenis kelamin laki-

laki, dan sebanyak 30% atau 21 orang berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari jabatan, dapat pula diketahui bahwa yang menjabat sebagai kasubag sebanyak 27 orang atau 38,57%, yang menjabat sebagai kabis sebanyak 30 orang atau 42,85%, dan yang menjabat sebagai kadis sebanyak 13 orang atau 18,58%.

Dilihat dari tingkat pendidikan, dapat pula diketahui bahwa yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 17 orang atau 24,29%, S1 sebanyak 38 orang atau 54,29%, serta S2 sebanyak 15 orang atau 21,42%.

Dilihat dari lama jabatan, dapat pula diketahui yang menjabat selama 1-5 tahun sebanyak 32 orang atau 45,71%, sedangkan yang menjabat selama > 5 tahun sebanyak 38 orang atau 54,29%.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dari pengolahan Data SPSS versi 17, maka persamaan regresi linier berganda akan terlihat sebagai berikut:

$$Y = 23,590 + 0,288X_1 + 0,200X_2 + 0,05$$

3.2.2 Statistik Deskriptif

Tabel VI.3
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Pemerintah Daerah	41,24	5,822	70
Partisipasi dalam penganggaran	29,17	7,311	70
Peran Manajerial	46,09	9,387	70

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data, mulai dari jumlah data (N), Nilai rata-rata (*Mean*), Standar penyimpangan data (Std Deviasi). Salah satu pendekatan deskriptif dapat dilihat melalui frekuensi yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan kelompok data berdasarkan atas gejala pusat (*tandency central*) dari kelompok tersebut.

Dari tabel IV.3 dapat diketahui bahwa didalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu: Partisipasi dalam Penganggaran, Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah. jumlah data sampel penelitian sebanyak 70 sampel data jumlah responden. Dari tabel dapat diketahui nilai rata-rata jawaban responden untuk variabel partisipasi dalam penganggaran adalah sebesar 29,17 dengan memperoleh standar deviasi 7,311. Untuk variabel Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah diperoleh nilai rata-rata 46,09 dengan standar deviasi 9,378. Dan untuk variabel Kinerja Pemerintah

Daerah memperoleh nilai rata-rata 41,24 dan standar deviasi 5,822.

3.3 Uji Kualitas Data

3.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 22 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Untuk menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap *Degree of freedom* ($df = n-2$), dimana n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini diperoleh $df = 70-2 = 68$ dengan tingkat signifikansi 5%. Nilai r tabel dengan derajat bebas (df) 68 adalah sebesar 0,235.

3.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS 17. Jika hasil yang diperoleh dari pengujian ini menunjukkan bahwa nilai alphanya besar dari 0,05 maka instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel (handal).

Tabel IV.5
Hasil Uji Reliabilitas

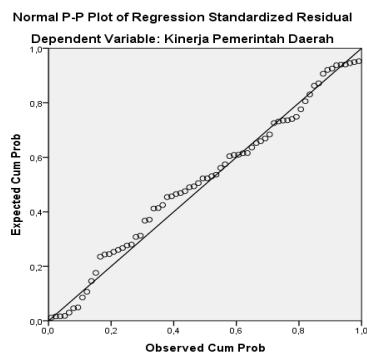
Variabel	Jumlah Item	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Partisipasi	6	0,866	Reliabel
Peran manajerial	9	0,875	Reliabel
Kinerja	7	0,877	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa koefisien Reliabilitas instrumen partisipasi dalam penganggaran, Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, dan Kinerja pemerintah Daerah menunjukkan Cronbach Alpha lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini Reliabel.

3.4 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dapat dilihat dari grafik p-plot. Hasil pengujian normalitas data dengan grafik p-plot untuk variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar VI.1 : Normal P-Plot
Regression Standarized Residual
Sumber : Pengolahan Data SPSS

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel adopsi titik menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebasnya. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah uji besaran *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*, jika VIF dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat variabel partisipasi dalam penganggaran memiliki nilai VIF 1,001 dan Nilai *Tolerance* 0,999. Variabel Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,001 dan *Tolerance* sebesar 0,999. Dari kedua variabel independen diatas memiliki nilai VIF dan *Tolerance* mendekati angka 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

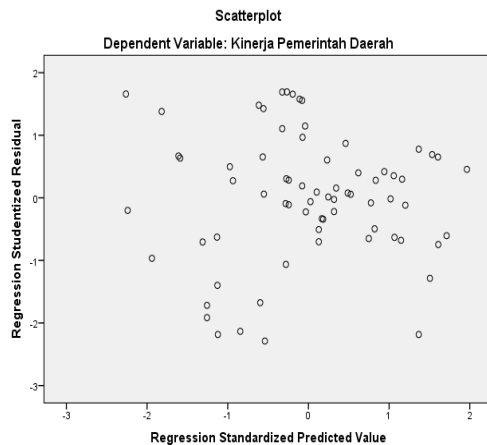
Tabel VI.6
Tabel Nilai VIF dan *Tolerance*

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Partisipasi dalam Penganggaran	0,999	1,001	Bebas Multikolinieritas
Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah	0,999	1,001	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Pengolahan Data SPSS

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Jika diagram pancar tidak membentuk pola (acak), maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Dari hasil *Scatterplot* dibawah diagram tidak membentuk pola atau terlihat berpencar yang berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas.



Gambar IV.2 *Scatterplot*

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar dibawah angka nol pada sumbu Y. oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

3.5.3 Uji Autokolerasi

Menguji autokolerasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Hasil uji *Durbin Watson* menunjukkan angka 1,385 untuk dependen variabel adopsi, berarti DW berada diantara -2 dan +2 yang artinya tidak terjadi kolerasi.

Tabel IV.7
Pengujian Autokolerasi

Model	Durbin Watson
1	1,385

Dependen variabel: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS

3.6 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

H1 : Pengaruh Partisipasi dalam Penggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H1 diterima, sebaliknya apabila p value (sign) > dari 0,05 maka H1

ditolak. Dalam penelitian ini p value (sign) 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adanya koef β sebesar 0,288 menyatakan adanya pengaruh positif antara partisipasi dalam penganggaran dengan kinerja pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

H2 : Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H2 diterima, sebaliknya jika p value > dari 0,05 maka H2 ditolak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai p value (sign) sebesar 0,004 , dengan demikian hasil penelitian menerima hipotesis kedua yang menyatakan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adanya koef β sebesar 0,200 menyatakan bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik peran manajerial pengelola keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah sebesar 0,230 atau 23% dan sisanya 0,770 atau 77% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Partisipasi dalam penganggaran merupakan keterlibatan seluruh kasubag sampai kadis untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong kasubag, kabid, dan kadis untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang mereka miliki sehingga dapat meningkatkan kinerjanya agar mereka mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang positif antara partisipasi dalam penganggaran dengan kinerja pemerintah daerah. Peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (pengguna dan kuasa pengguna anggaran/ barang) untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Peran manajerial pengelola keuangan daerah seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peran manajerial tersebut, mendorong para pengelola keuangan daerah untuk lebih berpartisipasi dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, melaksanakan tujuan yang telah

ditetapkan oleh organisasi pemerintah daerah.

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel IV.10
Hasil Uji Sigifikansi Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
¹ Regression	538,633	2	269,317	10,023	,000 ^b
Residual	1800,238	67	26,869		
Total	2338,871	69			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Partisipasi dalam penganggaran, Peran Manajerial

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Uji F, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dikatakan tidak signifikan, karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dikatakan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini diperoleh nilai F tabel : $k-1=n-k-1$, $2-1=70$. $1= 67$. Nilai F tabel dari $67= 3,984$, sedangkan F hitung yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu sebesar 10,023. Dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima artinya pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

3.6.3 Uji parsial (Uji t)

Berdasarkan Uji t, Pengujian tersebut dilakukan satu arah dengan tingkat signifikan 5% dengan *degree of freedom* (dF)=n-k. Uji t ini

membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu apabila t hitung > t tabel berarti bahwa variabel bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Maka t tabel dari penelitian ini adalah $n-k= 70-2= 68$ yaitu 1,668. Sedangkan t hitung variabel partisipasi dalam penganggaran yang diperoleh dari penelitian ini adalah 3,378. Maka diperoleh t hitung > dari t tabel yang artinya variabel partisipasi dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun nilai t hitung variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 3,015. Maka diperoleh t hitung > dari t tabel yang artinya variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel IV.11
Hasil Uji Signifikansi Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,590	4,041		5,838	,000		
Partisipasi dalam penganggaran	,288	,085	,362	3,378	,001	,999	1,001
Peran Manajerial	,200	,066	,323	3,015	,004	,999	1,001

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian ini membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penganggaran akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. hasil ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih (2009) yang menyatakan bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.2 Keterbatasa dan Saran

4.2.1 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek.
2. Responden penelitian ini hanya 3 sampai 4 orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu kasubag keuangan/perencanaan, kasubag perencanaan, kbid keuangan dan kbid perencanaan, serta kadis .
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan

dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektifitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.

4.2.2 Saran

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan yang dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya dan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan jumlah sampel dan melengkapi metode survey dengan melakukan wawancara
2. Untuk penelitian lain yang serupa dapat dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh.
3. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar meningkatkan partisipasi pejabat yang berperan dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan peran manajerial pengelola keuangan agar tercipta kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Anurti, Sriwelmi. 2013. *Pengaruh Peran manajer Pengelola Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja*

SKPD dilingkungan kakota Padang (Jurnal Akuntansi).

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: Indeks.
- Darlis, Edvan. 2001. *Analisis Pengaruh Komitmen Orgaisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran*, Simposium Nasional Akuntansi. 30-31 Agustus. Bandung. 523-524
- Ginting, Hartika Sari. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo* (Jurnal Akuntansi).
- Hafis Tanjung, Abdul. 2006. *Akuntansi Pemerintahan daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: 2012
- Halim, Abdul dan Syukrillah Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah*

- Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi.*
- Hermaningsih. 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak* (Tesis).
- Haryanto, Eko. 2006. *Penganggaran Partisipatif sebagai Motivasi Kinerja Manajer.*
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif).* Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.* Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2010, *Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kompak No 23, 573-587
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2000, *Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.* Jurnal Maksi volume 1, NO.2. Agustus 2007
- Sardjito, Bambang dan Osmad Mutaheer, 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X 26-28 Juli di Makassar.
- Tuasikal, Askam. 2007. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan*

terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Wati, Eniza. 2013. *Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.*

http://rohulnews.com/berita_dtl.php?id=2665&c_jns=4 diakses tanggal 8 Januari 2014.

<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/796-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah> diakses tanggal 17 Januari 2014

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ROKAN%20HULU_4_2011.pdf diakses tanggal 19 Januari 2014

http://inforohul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=693:dprd-terima-lpj-apbd-rohul-tahun-anggaran-2012&catid=81:info-rohul&Itemid=501 diakses tanggal 20 Januari 2014.

[http://www. Bpk.go.id/web/](http://www.Bpk.go.id/web/)